

PETANI, LAHAN KERING DAN UPAYA KONSERVASI¹

Dwi Sadono²

Abstrak

Pembangunan pertanian dan perdesaan selama ini cenderung bias ke lahan sawah atau daerah hilir. Oleh karena itu, daerah lahan kering atau daerah hulu relatif tertinggal jauh. Pertambahan penduduk, terbatasnya kesempatan kerja, kemudian masuknya komoditas perdagangan (hortikultura) telah menyebabkan perambahan hutan dan intensifikasi lahan di daerah hulu yang berbukit dan rawan erosi. Hal ini akan mengancam kelestarian usahatani dan sumberdaya lain baik di daerah hulu maupun hilir. Pemerintah telah berupaya melakukan konservasi/penghijauan namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Program konservasi dengan pendekatan proyek (waktu terbatas, tergesa-gesa, management by objective) tidak mampu menumbuhkan kemandirian/keswadayaan petani pemanfaat program untuk mencapai konservasi yang lestari. Untuk meningkatkan kinerjanya perlu melibatkan partisipasi aktif kelompok tani pemanfaat mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan monitoring, serta pemanfaatan hasil, dengan pendekatan komunikasi yang dialogis, partisipatif dan kesetaraan.

Kata Kunci : lahan kering, upaya konservasi, partisipasi aktif masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam GBHN ditegaskan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, pembangunan kawasan dan daerah yang kurang berkembang, seperti KTI, daerah terpencil dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai upaya perwujudan Wawasan Nusantara.

¹ Perbaikan dari makalah yang disampaikan pada Seminar dengan tema "Integrasi Pembangunan Wilayah Hulu dan Hilir" di UGM Yogyakarta, tgl 19 Februari 2002 dalam rangka Faculty Exchange Program-SEARCA.

² Staf Pengajar Jurusan Sosek Pertanian, Faperta IPB

Sasaran pembangunan desa pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, khususnya pada Repelita VI ada 9 diantaranya yang ke enam adalah makin mantapnya pola keterpaduan pembangunan di desa dan keterkaitan pengembangan desa dan kota. Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada umumnya dan sasaran pembangunan desa pada khususnya, dalam Repelita VI dikembangkan pembangunan desa yang meliputi lima hal, diantaranya yang ke lima adalah pemantapan keterpaduan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan (Haeruman, 1997). Ini berarti bahwa pembangunan wilayah pada hakekatnya merupakan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan, wilayah hilir dan hulu yang terintegrasi dan saling mengisi.

2. LAHAN KERING

Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian/perdesaan, berbagai program telah diintroduksi oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga petani. Namun demikian, berbagai program tersebut terutama terlalu bias masyarakat padi sawah atau daerah hilir (Amang, 1997). Program pembangunan lebih dikonsentrasikan di daerah hilir atau daerah sawah dalam rangka upaya mencapai swasembada beras. Daerah hulu kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya daerah hulu relatif jauh tertinggal dibandingkan daerah hilir (sawah). Daerah hulu wilayahnya relatif terbelakang karena kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, sarana komunikasi dan sarana lainnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat dan keluarga petani di daerah sawah atau hilir dengan mereka yang tinggal di daerah hulu atau daerah lahan kering. Sekalipun populasi dan tingkat kepadatan penduduk di daerah lahan kering/hulu cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah persawahan, namun fakta menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan cenderung dominan di daerah lahan kering/hulu.

Lahan pertanian di Indonesia – sebenarnya adalah lahan yang dapat ditanami (*arable land*) – tercatat sekitar 60 juta hektar (30% dari total luas lahan) (Arfin, 1997). Lebih dari 87 persen dari total lahan pertanian itu atau lebih dari 52 juta hektar yang dapat ditanami di Indonesia adalah lahan kering. Lahan kering ini meliputi areal kebun/ladang, dan huma, tanaman keras/perkebunan, semak belukar dan pepohonan serta lahan yang belum dimanfaatkan atau lahan bera. Di Pulau Jawa, pada umumnya lahan kering terletak di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS). Menurut Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi (1982), wilayah hulu DAS tersebut memiliki ciri-

ciri yang kurang menguntungkan. Wilayah hulu DAS dicirikan oleh topografi yang berbukit-bukit, kepekaan kondisi sumberdaya alamnya kurang sekali dan memiliki masalah pokok dalam mempertahankan kelestarian manfaat sumberdaya alam.

Relatif miskinnya sumberdaya alam serta rendahnya pendapatan dan daya beli petani di daerah lahan kering, cenderung membentuk perilaku mengeksploitasi lahan pertanian dan hutan secara tidak terkontrol dari masyarakat petani setempat. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan erosi, penurunan produktivitas lahan dan pendapatan keluarga petani berpendapatan rendah serta dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya. Fenomena degradasi lingkungan ini pada gilirannya akan senantiasa mengancam keberlanjutan pertanian lahan kering (Arifin, 1997) serta pembangunan di daerah hilir yang mengandalkan pada daya dukung air. Degradasi lingkungan ini sangat potensial menjadi sumber konflik antar daerah wilayah DAS dari hulu sampai hilir. Konflik dapat muncul bila setiap daerah yang dilalui sungai di wilayah DAS tersebut mulai saling menyalahkan dan saling menuntut karena kerusakan yang terjadi sepanjang DAS-nya. Oleh karena itu jelaslah bahwa pembangunan wilayah hulu dan hilir perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu.

Pertanyaan mendasar dalam kaitannya dengan pengelolaan suatu DAS adalah bagaimana mengelola DAS secara *sustainable* (berkesinambungan/lestari). Menurut Kuhnlen (1992) dalam konsep sustainability, suatu pembangunan di pedesaan harus dapat menjamin kebutuhan petani paling tidak untuk survival dan kelangsungan keseluruhan masyarakat di dalam ekosistem yang bersangkutan sepanjang masa. Dengan demikian, dalam pengelolaan suatu DAS mau tidak mau harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu: fisik, biologi, dan manusia. Manusia adalah pelaku yang memiliki peran sangat sentral dalam keberlangsungan suatu DAS. Tulisan ini mencoba mengungkap upaya konservasi di daerah lahan kering, khususnya di Cimanuk Hulu.

3. UPAYA KONSERVASI: PENGALAMAN DAS CIMANUK HULU

a. Gambaran Umum Wilayah DAS Cimanuk Hulu

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk termasuk salah satu DAS terpenting di Jawa Barat. Kondisi DAS ini sangat berpengaruh terhadap Sungai Cimanuk yang membentang mulai dari Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Wilayah DAS Cimanuk secara total meliputi wilayah seluas 375.200 ha, namun DAS Cimanuk Hulu sendiri mencakup wilayah seluas 144.452 ha yang tersebar di tiga wilayah kabupaten, yaitu Garut (79,59%), Sumedang ((19,30%), dan Bandung (1,11%) (BRLKT, 1995

dikutip oleh Mugniesjah *et al.*, 1997). Secara administrasi, wilayah DAS Cimanuk Hulu mencakup wilayah 15 kecamatan di Kab. Garut, 4 kecamatan di Kab. Sumedang dan 1 kecamatan di Kab. Bandung.

Penggunaan lahan di DAS Cimanuk Hulu sebagian besar untuk lahan pertanian, yakni berupa pertanian lahan kering dan sawah berturut-turut seluas 41.467 ha dan 39.557 ha. Hutan, kebun, dan permukiman juga mengambil lahan yang cukup luas. Luas lahan berupa hutan seluas 25.165 ha, kebun campuran 14.813 ha, dan permukiman seluas 10.181 ha (BRLKT, 1995 dikutip oleh Mugniesjah *et al.*, 1997).

Wilayah geomorfik DAS Cimanuk Hulu sebagian besar terdiri atas daerah berbukit dan bergunung yang dikelilingi oleh sejumlah gunung berapi. Keadaan topografinya didominasi lereng dengan kemiringan antara 15% sampai lebih dari 60% yang mencakup wilayah seluas 78.380 ha atau 54% dari luas areal total. Kemiringan lahan yang demikian merupakan hal yang sangat potensial untuk terjadinya erosi. Apalagi pada kemiringan lebih dari 40% masih banyak lahan yang dibudidayakan petani secara intensif untuk tanaman pangan atau hortikultura (semusim) tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan praktek-praktek konservasi tanah (Sadono *et al.*, 1997).

Di DAS Cimanuk Hulu masih terdapat lebih dari 60 ribu ha lahan kritis dengan produktivitas rendah serta tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi. Erosi tanah di daerah tangkapan yang direncanakan untuk Berdungan Jatigede (Wilayah Kab. Sumedang) ini sebesar 28,26 juta ton/tahun atau sebesar 190 ton/ha/tahun. Hal ini akan sangat membahayakan kelangsungan sumberdaya di wilayah tersebut dan di wilayah hilir. Itu sebabnya, pada tahun 1995 DAS Cimanuk Hulu telah ditetapkan sebagai salah satu DAS super prioritas di Indonesia untuk segera ditangani (BRLKT, 1995 dikutip Mugniesjah *et al.*, 1997).

b. Program RLKT di DAS Cimanuk Hulu

Meningkatnya permasalahan-permasalahan usahatani di lahan kering tersebut di atas, sebenarnya telah menggugah pemerintah Indonesia untuk melakukan program-program konservasi lahan pada tahun 1970-an (World Bank, 1994). Di DAS Cimanuk Hulu, proyek penghijauan dan reboisasi telah diselenggarakan sejak tahun 1970-an melalui gerakan "rak-gantang" (Gerakan Gandrung Tantangkalan) (Mugniesjah *et al.*, 1997). Program RLKT yang diintroduksi kepada masyarakat pertanian lahan kering di DAS Cimanuk Hulu diberikan berupa bantuan penghijauan dan reboisasi, yang sekarang dikenal dengan proyek UP-UPSA disertai komponen-komponen lain berupa pembuatan Kebun Bibit Desa beserta

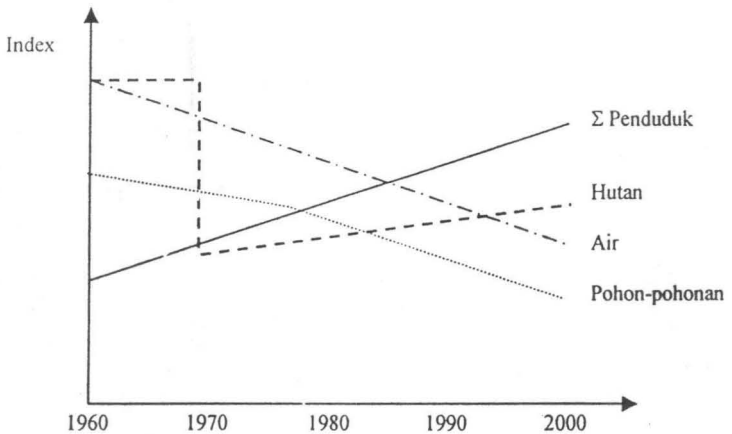
kelompok yang mendukungnya, pembuatan terasering, pembuatan bangunan konservasi tanah seperti pembuatan Saluran Pembuangan Air (SPA), rehabilitasi teras, Dam Pengendali dan Dam Pengaman jurang, serta reboisasi dengan tanaman jengkol, alpukat dan tanaman keras lainnya kepada masyarakat petani di sebagian besar desa-desa kasus. Demikian pula hutan tanaman reboisasi dan penghijauan areal dampak dan penghijauan swadaya. Kepada para tokoh masyarakat petani yang di desanya diselenggarakan PIL, mereka diberikan pelatihan program penghijauan yang diadakan di Balai Pelatihan Sub-Balai RLKT di Malangbong, Kabupaten Garut.

Setelah berjalan cukup lama, perkembangan keberhasilan proyek-proyek penghijauan dan reboisasi tahun 1976/1977 sampai dengan 1991/1992 (EXSA 1995) dapat disimpulkan bahwa program tersebut belum berhasil secara maksimal. Dalam proyek Dam Pengendali dan Dam Penahan Erosi, di Kabupaten Garut relatif lebih berhasil dimana jumlah unit proyek yang berfungsi masing-masing lebih dari 65%. Sementara untuk kegiatan UP-UPSA dan Hutan Tanaman Inpres Reboisasi, di Kabupaten Sumedang relatif lebih lebih berhasil, masing-masing 46,60% dan 59,54% dibanding di Garut sebesar 21,93% dan 44,20%.

c. Persepsi Petani terhadap Kondisi Lingkungannya

Petani di daerah lahan kering menggambarkan bahwa kondisi lingkungannya (pohon-pohonan, air, hutan, kesuburan tanah) pada dekade 60-an lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi saat ini (Gambar 1). Menurut penduduk, hal tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat di semua desa di daerah lahan kering. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya penggantian status hutan alam menjadi hutan produksi (tanaman hutan diganti dengan pohon pinus) pada dekade 70-an. Penduduk menilai, ketersediaan air berkurang karena debit air di mata air yang umumnya ada di hutan berkurang. Sementara sebagian besar penduduk di daerah tersebut mengandalkan kebutuhan airnya dari sumber mata air, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan pertaniannya.

Hutan menurut masyarakat juga berfungsi untuk menyimpan air ketika musim hujan datang. Penggantian tanaman hutan dengan pohon pinus, dinilai tidak dapat menyimpan air. *Caah* (air deras/banjir lewat) di beberapa kampung di Desa Sukakarya pada dekade 80-an merupakan salah satu akibat penggantian status hutan di sekitar kampung mereka.



Gb 1. Persepsi Masyarakat tentang Kondisi Lingkungannya
Sumber: Sadono *et al.*, 1997

d. Persepsi Petani dalam Program UPSA

Hasil penelitian Mugniesjah *et al.* (1997) menunjukkan bahwa program penghijauan berupa pembuatan persemaian, pembuatan hutan/kebun rakyat dan penghijauan lingkungan - baik secara perorangan maupun kelompok - secara kuantitas meningkat, namun belum diikuti secara kualitas. Dalam pembuatan terasering, petani di beberapa desa membuatnya dengan tidak mengikuti garis kontur dan umumnya belum menanaminya dengan rumput/tanaman penguat teras. Demikian pula halnya dalam hal pembuatan SPA dan terjunan air, belum mengikuti standar teknis.

Meskipun upaya-upaya penghijauan telah lama dilakukan namun demikian, kesinambungan proyek ini belum menunjukkan hasil nyata. Di beberapa desa kasus, pembuatan terasering telah rusak karena tidak dipelihara atau bahkan dirusak oleh penduduk yang menjadi peserta kelompok UP-UPSA (Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam). Hal ini tampaknya berhubungan dengan persepsi petani peserta menganggap bahwa pembuatan terasering kurang menguntungkan dilihat dari peningkatan output, bahkan dianggap mengurangi luas bidang olah yang bisa ditanami. Petani di daerah hortikultura menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman, pembuatan terasering dianggap akan menyebabkan tergenangnya air dan mengakibatkan umbi kentang atau tanaman hortikultura lainnya yang mereka tanam akan membusuk (Sadono *et al.*,

1997). Masuknya tanaman sayur-sayuran yang marak pada tahun 90-an, telah menyebabkan pemanfaatan lahan yang semakin intensif. Pohon-pohonan di perbukitan ditebangi untuk digantikan tanaman sayuran, bahkan untuk bukit yang cukup terjal. Meskipun demikian, di beberapa desa tampak bahwa bangunan teras dan tanaman penguat teras cukup terpelihara. Ini terutama tampak pada desa-desa dengan pengusahaan tanaman campuran antara tanaman hortikultura dan palawija. Tampaklah bahwa komersialisasi produksi (*commercialization of production*), dimana tujuan-tujuan produksi pertanian adalah untuk dijual ke pasar (lokal atau ekspor) telah menyebabkan tindakan petani untuk mengeksploitasi sumberdaya lahan. Upaya-upaya komersialisasi ini sangat bertentangan dengan filosofi produksi pertanian di lahan kering pada periode-periode sebelumnya yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Sekalipun wanita tidak menjadi kelompok sasaran secara langsung dari program RLKT, namun dari berbagai forum diskusi selama PRA (*Participation Rural Appraisal*) dilangsungkan, diketahui bahwa kesadaran dan pengetahuan petani akan pentingnya usaha konservasi lahan dan usaha tani berkelanjutan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pengetahuan mereka yang mengetahui dengan baik sebab-sebab terjadinya lahan "kritis" (erosi lahan/jurang) dan mengetahui kegunaan penghijauan baik bagi kesejahteraan mereka (pendapatan) maupun bagi pemeliharaan kualitas lingkungan hidup mereka. Mereka juga mampu menunjukkan bahwa ditempat/kampung tertentu di desa mereka terdapat tempat yang tidak longsor karena adanya tanaman/pohon yang menahan longsornya tanah.

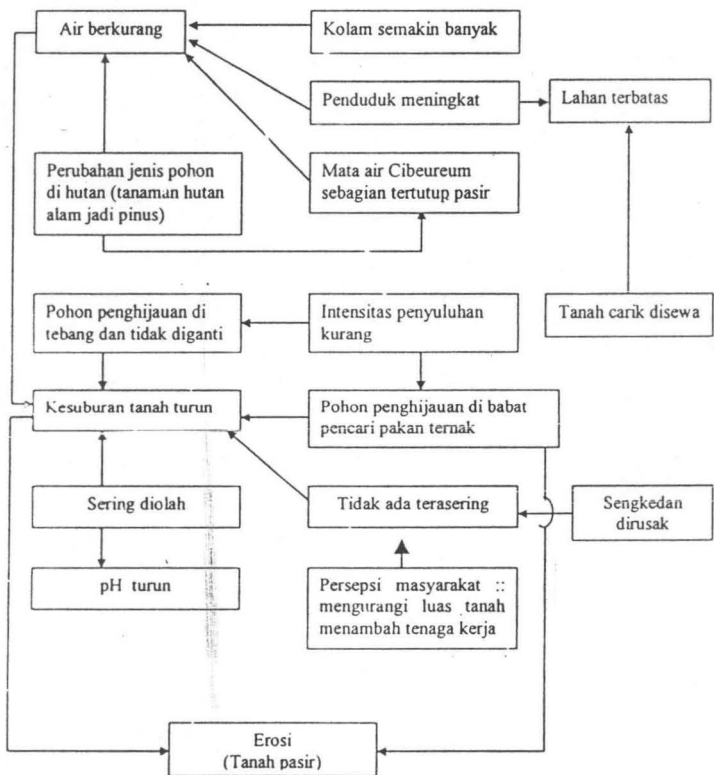
Pengetahuan petani, baik pria maupun wanita, tentang jenis tanaman penghijauan juga tidak jauh berbeda. Hampir di semua desa kasus, wanita dapat merinci sebagian besar nama jenis tanaman penghijauan yang disebut pria, seperti *pinus*, *suren*, *kaliandra*, *afrika*, *mahoni*, *tisuk*, *alpukat*, *nangka*, *mindi*, *saninten* dan sebagainya.

e. Permasalahan Upaya Konservasi

Peserta PRA, pria dan wanita pada semua lapisan masyarakat mengatakan bahwa mereka sebenarnya mau saja menanam tanaman yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya erosi, namun mereka dihadapkan pada permasalahan (Gambar 2). Pertama, bibit tanaman yang mereka tanam seringkali "hilang", antara lain karena "disabit" untuk pakan temuk, terinjak pejalan kaki, terinjak atau dimakan hama babi. Kedua, banyak peternak yang mengambil daun tanaman kayu-kayuan (seperti albasia) yang sudah besar dengan cara kurang baik sehingga merusak pertumbuhan pohonnya, bahkan jika kebunnya jauh, kayu tersebut tidak bisa dipanen karena sudah ada yang

menebangnya. Ketiga, tanaman kayu-kayuan berakar besar dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hortikultura yang ditanam dekat pohon tersebut. Keempat, tajuk pohon akan menaungi tanaman semusim/hortikultura baik yang ada di lahan usahatani mereka sendiri maupun orang lain dan dapat menimbulkan konflik dengan pemilik lahan sebelahnyanya.

Keberlanjutan pertanian lahan kering juga terancam dengan meningkatnya kelangkaan sumber/mata air. Desa-desa di daerah lahan kering, tergolong miskin akan sumber air yang dapat digunakan baik untuk pertanian maupun untuk memenuhi



Gambar 2. Bagan Permasalahan di Desa-desa Lahan Kering
Sumber: Sadono *et al.*, 1997.

kebutuhan dasar penduduk (domestik). Meningkatnya sumber/mata air yang tidak berfungsi menurut petani berhubungan dengan meletusnya Gunung Galunggung, sekalipun letusan tersebut juga diyakini petani membawa berkah pada meningkatnya kesuburan lahan usahatani mereka. Kelangkaan air juga cenderung meningkat setelah hutan produksi milik Perum Perhutani memproduksi kayu pinus untuk komoditi ekspor. Bahkan penduduk mengatakan bahwa di beberapa lokasi, hutan pinus mengeringkan atau "mematikan" sumber/mata air karena setelah tanaman hutan diganti pohon pinus terjadi pengurangan debit air yang cukup berarti (Sadono *et al.*, 1997). Permasalahan klise tetapi cukup mendasar yang ada pada sub-Balai RLKT atau kini Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (Dinas FKT) adalah rendahnya frekwensi dan intensitas penyuluhan (pembentukan kelompok tani tergesa-gesa, sosialisasi program terbatas, dan lain-lain) serta monitoring dan evaluasi oleh petugas penyuluh. Masyarakat menyebutnya "ceb-cul" (setelah ditanam, PLP tidak muncul-muncul lagi). Hal ini menurunkan semangat petani dalam pemeliharaan tanaman penghijauan.

4. MENUJU UPAYA KONSERVASI YANG BERKELANJUTAN

Manusia menempati faktor sentral dalam upaya pengelolaan DAS yang lestari. Namun dalam kenyataannya faktor manusia (sebagai subyek dan pemanfaat program) masih sering diabaikan. Dalam upaya pengelolaan DAS yang lestari tersebut, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana agar manusia dapat hidup layak tanpa harus merusak lingkungan. Dalam hal ini, mereka yang tinggal di wilayah DAS tersebut harus dilibatkan dalam menentukan apa yang cocok dan layak untuk hajat hidupnya dengan memanfaatkan lingkungannya (hutan, lahan pertanian, air, dan sungai) secara positif.

Dari upaya konservasi di DAS Cimanuk Hulu dapat diambil pelajaran penting untuk menunjang proyek penghijauan yang berkelanjutan, yaitu perlunya melibatkan partisipasi aktif petani dalam program pembangunan, melalui proses komunikasi yang baik (efektif) yaitu model komunikasi *konvergen* yang berciri dialogis, partisipatif, dan kesetaraan (Sumardjo, 1999). Pemerintah selaku regulator harus dapat mengkomunikasikan program-programnya dengan baik kepada masyarakat yang hidup di lingkungan DAS tersebut dan mampu menangkap keinginan masyarakatnya. Jika tidak terjadi komunikasi yang baik (efektif) antara pemerintah dan rakyat, akan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi yang mengakibatkan program penanganan dan pengelolaan DAS tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak lestari.

Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) adalah peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil program/ proyek. Masyarakat berpartisipasi aktif (tinggi) apabila peranserta masyarakat tidak hanya dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan hasil tetapi juga berperanserta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Petani sebagai pemanfaat program perlu dilibatkan sejak dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Sebagai contoh, dalam hal penentuan jenis tanaman penghijauan maka pilihan tanaman hendaknya disesuaikan dengan pilihan petani. Tanaman yang disarankan petani di Garut adalah tanaman yang kurang disukai domba, tajuknya tidak terlalu menaungi lahan di bawahnya dan mempunyai nilai jual cukup tinggi atau kayunya baik untuk bahan bangunan. Tanaman yang banyak disebut adalah *kalites* (eucaliptus), *afrika*, dan *suren*. Dari kalangan wanita muncul tanaman lain selain yang disebutkan di atas yang disarankan yaitu tanaman alpukat karena setiap tahun dapat menghasilkan. Berkaitan dengan waktu tanam, pohon penghijauan hendaknya ditanam pada musim hujan sehingga tidak mati kekeringan pada awal pertumbuhannya.

Berkaitan dengan sasaran penyuluhan, sasaran tidak hanya petani tetapi juga para peternak dan sosialisasinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga masyarakat paham apa tujuan dan manfaat konservasi/penghijauan. Program yang dilaksanakan pemerintah selama ini, termasuk program konservasi, dilakukan dengan pendekatan proyek biasanya mempunyai batas waktu pelaksanaan yang relatif sempit (terikat tahun anggaran pemerintah, 1-3 tahun). Untuk menjaga efektivitasnya seringkali intervensi proyek dilakukan secara tergesa-gesa (paksaan) – mengasumsikan nilai "jika rakyat desa dipaksa, menjadi terpaksa, dan lama-kelamaan akan terbiasa" dengan pola bentukan dari pemerintah (Sajogyo, 1969; Soewardi, 1995), dan dikelola dengan pendekatan *management by objective* (manajemen keterlaksanaan proyek) (Utomo, 1998). Proyek dinilai dengan mengevaluasi tingkat realisasi target, dengan cara yang paling mudah adalah total dana yang telah dialokasikan dalam DIP pada tahun anggaran yang bersangkutan. Utomo (1998) melihat bahwa dewasa ini dalam pelaksanaan program-program pembangunan makin mendesak perlunya melakukan pengendalian melalui *management by process* yang mempunyai kelebihan yaitu mampu mendeteksi gejala-gejala yang menyimpang (kesalahan prosedur). Cara pengendalian seperti ini tidak hanya bergantung kepada evaluasi akhir (*post-facto evaluation*) melainkan melalui suatu evaluasi proses yang sedang berjalan (*on-going evaluation*).

Selama ini dalam pelaksanaan program konservasi dan pengelolaan DAS, khususnya pada jalur *government* dari pusat sampai tingkat lokal dan kelompok tani, hubungan yang muncul umumnya berupa bentuk hubungan vertikal-instruksional dan dengan partisipasi yang semu (Kolopaking dan Tonny, 1994). Dalam pembentukan kelompok, kelompok yang terbentuk bukan atas kesadaran masyarakat sendiri tetapi atas bentukan pemerintah/penyuluh dan tergesa-gesa, seringkali gagal menghasilkan kemandirian pemanfaat program. Pembentukan kelompok yang tergesa-gesa dan tanpa sosialisasi yang memadai, tetapi lebih dimaksudkan untuk mengejar waktu pengucuran dana proyek terbukti tidak akan mampu untuk menumbuhkan kepentingan bersama dan rasa kepemilikan bersama (Maolidah, 2001; Pusat P3R-YAE, 2000). Kelompok-kelompok bentukan baru untuk kepentingan proyek -- yang dibuat secara tergesa-gesa -- aktivitasnya akan sangat mengandalkan aktivitas pengurus. Jika pengurusnya tidak aktif maka kelompok akan bubar, atau tinggal nama saja. Pada kelompok yang pengurusnya aktif, maka keberlanjutan kelompok akan tetap dapat dipertahankan. Namun seringkali, pemimpin kelompok ini gagal membangun sistem kepemimpinan modern sehingga mempersulit pengontrolan oleh anggota serta tidak adanya penyiapan kaderisasi menyebabkan kelompok akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya pengurus tersebut.

5. BIBLIOGRAFI

- Amang, B. 1997. Kata Pengantar dalam Arifin, B. et al. (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Lahan Kering untuk Penyediaan Pangan Abad 21. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Jakarta.
- Anonimous. 1994. Berbuat Bersama Berperan Setara (Participatory Rural Appraisal, Gambaran Teknik-teknik). Studio Driya Media untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. Bandung.
- Arifin, B. 1997. Pendahuluan: Lahan Kering untuk Penyediaan Pangan Abad 21 dalam Arifin, B. et al. (Penyunting). Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Lahan Kering untuk Penyediaan Pangan Abad 21. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Jakarta.

- Cohen, J.J. and T.N. Uphoff. 1977. Rural Development Participation Measured for Project Desain Implementation and Evaluation. Monograph Series No. 2. Cornell University. Ithaca.
- EXSA International Co. Ltd. 1995. The Study for Upland Soil and Water Conservation of the Catchment of the Proposal Jatigede Reservoir. Departemen Kehutanan.
- Haeruman, H. 1997. Strategi Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa ke Arah Integrasi Perekonomian Kota-Desa. *Mimbar Sosek, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 10 No. 2 Agustus 1997. Jurusan Sosek Pertanian Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Kolopaking, L.M. dan F. Tonny. 1994. Aspek Kelembagaan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu. *Mimbar Sosek, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* No. 8, Desember 1994. Jurusan Sosek Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Kuhnen, F. 1992. Sustainability, Regional Development, and Marginal Locations. *Applied Geography and Development*, vol. 39.
- Maolidah, I.M. 2001. Pola Kepemimpinan dan Interaksi Sosial Kelompok Masyarakat dalam Program PDM-DKE. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Mugniesjah, S.M., *et al.* 1997. Peranan Wanita dalam Pertanian Lahan Kering. Proyek Konservasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional Komponen DAS Cimanuk Hulu. Kerjasama Lembaga Penelitian-IPB dengan Bappeda Jawa Barat.
- Pusat P3R-YAE. 2000. Kajian dan Rencana Aksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro serta Lembaga Ekonomi Desa secara Berkelanjutan. Makalah Disampaikan dalam Workshop Memberdayakan Ekonomi Rakyat Menuju Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Desa yang Berkelanjutan, Bandung, 12 Desember 2000.
- Sadono, D. *et al.* 1997. Peranan Wanita dalam Pertanian Lahan Kering. Laporan *Participation Rural Appraisal* (PRA) Desa Haruman Kec. Leles, Desa Sukakarya Kec. Samarang, dan Desa Sirnagalih Kec. Bayongbong, Kab. Garut. Proyek Konservasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nasional Komponen DAS Cimanuk Hulu. Kerjasama Lembaga Penelitian-IPB dengan Bappeda Jawa Barat.

- Sajogyo. 1989. Peluang Berusaha dan Bekerja pada Masyarakat Petani. Prisma, Tahun 18 No. 2. LP3ES. Jakarta.
- Soewardi, H. 1995. Makalah Bahasan pada Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II yang diselenggarakan oleh PSE, Pustaka dan CIIFAD, Ciawi Bogor, 4-5 Juli 1995.
- Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Propinsi Jawa Barat. Disertasi. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Utomo, B.S. 1998. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Masalah-masalahnya. *Mimbar Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Vol. 11 No. 2, Agustus 1998. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Panduan Penulisan Naskah

Umum

Naskah diketik dua spasi pada kertas putih (HVS) ukuran kuarto, tidak: timbal-balik dengan menggunakan program WS7, WP atau MS-Word. Susunan naskah mencakup judul tulisan, nama penulis (identitas dicantumkan pada catatan kaki yang menerangkan profesi penulis dan instansi tempatnya bekerja), abstrak, pendahuluan yang mencakup pokok permasalahan/isu dan tujuan penulisan, metodologi penelitian yang mencakup kerangka pemikiran/pendekatan, metode penelitian/analisis, hasil dan pembahasan yang mencakup lingkup bahasan hasil penelitian atau telaah konseptual, kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran (sesuai dengan keperluan). Panjang naskah sebaiknya tidak melebihi 30 halaman.

Khusus

1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang baku, dengan abstrak masing-masing tidak lebih dari 300 kata pada halaman terpisah
2. Tabel, Gambar dan Grafik dibuat pada halaman tersendiri, dengan judul yang singkat dan jelas, serta (jika perlu) mencantumkan sumber atau sumber data yang digunakan
3. Apabila merujuk pustaka yang penulisannya lebih dari dua orang, penggunaan *et al* setelah nama penulis pertama, namun dalam daftar pustaka semua nama penulis harus disebutkan. Untuk membedakan kutipan dari sejumlah pustaka yang berkaitan oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama, gunakan huruf a,b,c dst, misalnya Sayogyo (1993a, 1993b). Daftar pustaka disusun menurut abjad dan hanya memuat pustaka yang dirujuk dalam tulisan
4. Penomoran catatan kaki dilakukan secara berurutan pada seluruh naskah, tidak halaman per halaman. Penggunaan catatan kaki hanya untuk menjelaskan dan bukan untuk kutipan atau mengakhiri pembaca pada suatu tulisan/karya tertentu
5. Hindari penggunaan pernyataan atau notasi matematik yang berlebihan. Bila memang diperlukan, periksalah secara seksama agar formulasinya jelas. sedapat mungkin gunakan simbol matematika baku
6. Kepada setiap penyumbang naskah yang diterbitkan akan diberikan 3 (tiga) cetak ulang secara cuma-cuma
7. Naskah dikirim dalam bentuk disket dengan menyebut tipe/spesifikasi pengolah kata yang digunakan dan hasil cetakan rangkap dua (termasuk aslinya) dan dialamatkan kepada :

Guidelines for Submitting Manuscripts

General

Used double spaced typing on 8 1/2 x 11 inch paper with 1 1/4 inch margins throughout manuscript. Type only on one side of paper using word processor WS7, WP or MS-Word. Manuscript must include its title, author's name(s), and institutional affiliation on cover page, abstract, introduction, and objectives. Main problem (s)/issue (s) and objective (s) must be stated. Writing, research methodology comprises framework/thought/approach, research methods/analysis, and discussions, included discussion of research or conceptual analysis, conclusion and recommendation, and ended with Bibliography and Appendix (if needed). Manuscript length is suggested not exceeding 30 pages including text, footnotes, references, tables and figures.

Specific

1. Manuscript is written in standard English or Indonesian, with abstract of 300 words or less on a separate page
2. Tables, Figures, and Graphics are on separate pages, with titles stated in brief and clarity, and (if needed) put the source or sources of data used
3. When referring to literature written by more than two persons, use *et al*, after first author's name, throughout the manuscript. To distinguish quotations from sources, use the last name of the author(s) in the text. To distinguish literatures from the same author (s) in the same year, use letter a,b,c, etc, for instance Sayogyo (1993a, 1993b). List all references cited in the text in alphabetical order of the author's last name on a separate page after main text
4. Number footnotes consecutively throughout the manuscript. Footnotes should be only explanatory and not for citations or for directing the reader to a particular work
5. Avoid excessive mathematical expressions and notation. When mathematical expressions are used, check carefully for clarity in formulae. Use standard mathematical symbols to the maximum possible
6. To each contributor whose manuscript is published, three (3) reprints will be given 3 (three) reprints, gratis
7. Manuscript should be submitted in the form of a diskette specifying type of word processor used and two copies of print-out (including the original) and addressed to

Redaktur/Editor Mimbar Sosok
Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian, IPB/Dept. of Social Economics
Faculty of Agriculture, BAU
Bogor, Indonesia, 16143, Fax (0251) 629344